SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023

PERGUB DIY NO.23, BD 2023/NO.23, 23 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- ABSTRAK
- Dalam rangka penyesuaian Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur Ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai : jenis data; penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta; penyelenggaraan satu data pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; manajemen data; portal data Daerah Istimewa Yogyakarta; manajemen hak akses; partisipasi; dan pendanaan. Jenis data pembangunan daerah terdiri dari data geospasial dan data statistik. Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat provinsi dilaksanakan oleh: Pembina Data Tingkat Provinsi; Walidata Tingkat Provinsi; Walidata Pendukung Tingkat Provinsi; dan Produsen Data Tingkat Provinsi. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas: perencanaan data; pengumpulan data; pemeriksaan data; dan penyimpanan dan penyebarluasan data. Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2023.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.